

SCAN ME

HARIAN LENTERA

Inspirasi Perubahan **TODAY**

Edisi Senin, 21 Agustus 2023

KORAN DIGITAL
LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat
12 Halaman
download edisi digital
www.lenteratoday.com
**VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021**

www.lenteratoday.com

@lenteratoday

f lentera.tv

@lenteratoday

Lentera TV Media

LenteraPodcast

@lenteratoday

PENGUSAHA ANCAM PEMERINTAH BERSIAP MINYAK GORENG LANGKA

Sudah setahun setengah Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menagih pembayaran pemerintah terkait rafaksi alias pembayaran selisih harga migor dalam program satu harga pada 2022. Sayangnya, hingga kini utang senilai Rp344 miliar tak pasati kapan akan dibayarkan. Pelau usaha pun kembali mengancam bakal menyetop pasokan minyak goreng. Bahkan, bila pemerintah tak segera memberi kejelasan, pengusaha ritel akan mengambil langkah terakhir yaitu membawa ke 'meja hijau'. Mereka bakal melakukan gugatan hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Menurut pantauan di situs Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, Minggu (20/8/2023), harga Minyak Goreng Curah secara rata-rata nasional Rp 15.400/Kg. Posisi ini turun 32% atau Rp 50 dibanding hari sebelumnya. Sementara Minyak Goreng Kemasan Bermerk stabil diangka Rp 19.800-Rp 21.300/Kg. Pemerintah sendiri memilih optimistis tidak ada kelangkaan. Pasalnya selain di toko ritel, komoditas ini juga tersedia di pasar dan toko tradisional.

(Baca Hal 11)

MENYISIR AKAR MASALAH UTANG MIGOR RP344 M PEMERINTAH KE PERITEL

- KEBIJAKAN SATU HARGA MINYAK GORENG**
Untuk menekan harga minyak goreng yang melambung tinggi, Muhammad Lutfi Menteri Perdagangan saat itu, pada menetapkan kebijakan tersebut di gerai-gerai ritel modern untuk seluruh jenis minyak goreng. Dasar hukum dari kebijakan tersebut adalah Peraturan Menteri Perdagangan No. 3/2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
- RESHUFFLE MENTERI PEDAGANGAN**
Pada 15 Juni 2022, Presiden Joko Widodo melantik Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan
- PEMERINTAH NUNGGAK UTANG**
Pembayaran harusnyadiselesaikan paling lambat enam bulan setelah tanggal itu [berakhirnya kebijakan]. Namun, karena [tenggat] sudah habis, dikatakan [pemerintah beralasan] tidak ada landasan regulasi untuk membayarnya.
- LEMPAR BOLA KEJELASAN PEMBAYARAN UTANG**
BPDPKS sudah menyiapkan dana tersebut, tapi masih menunggu verifikasi lembaga survei dan rekomendasi Kemendag untuk melakukan pencairan dana. Pemerintah sudah menunjuk Sucofindo, namun pada November 2022, Plt Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag menyatakan sudah tidak di Sucofindo tapi di BPKP. Kemudian pada Januari 2023 tugas tersebut sudah tidak di BPKP, tetapi sudah di Jampidum.



- APRINDO ANCAM BOIKOT**
Pemerintah belum melunasi hutang hingga lebih dari satu tahun. Pada 13 April 2023, Aprindo menyatakan akan menyetop penjualan minyak goreng dalam waktu dekat.
- APRINDO ANCAM BOIKOT**
Pemerintah belum melunasi hutang hingga lebih dari satu tahun. Pada 13 April 2023, Aprindo menyatakan akan menyetop penjualan minyak goreng dalam waktu dekat.
- KEMENDAG NEGO APRINDO**
Pada 27 April 2023, Kemendag berencana untuk bertemu dengan Aprindo guna membahas soal tunggakan sebesar Rp 344,15 miliar tersebut.
- JANJI LAKUKAN BAYAR**
Pemerintah belum melunasi tunggakan tersebut lantaran proses hukumnya masih sedang berjalan dan sedang ditindaklanjuti oleh Kejagung. Apabila Kejagung telah melakukan verifikasi dan pengecekan secara detail soal laporan dari Kemendag, pihaknya akan segera melakukan pelunasan terhadap tunggakan tersebut.

**Government (Hal.2)
Luhut 'Turun Gunung'
soal Polusi Jakarta
Seluruh Kementerian
Sepakat WFH**

UTANG



Luhut 'Turun Gunung' soal Polusi Jakarta Seluruh Kementerian Sepakat WFH



(Ilustrasi) ASN DKI Jakarta dipastikan akan melaksanakan Work From Home (WFH) 50 persen pada Senin tanggal 21 Agustus hingga 21 Oktober mendatang. (dok)

JAKARTA-Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan akhirnya 'turun gunung' mengatasi persoalan polusi udara di Jakarta dan sekitarnya. Menurut keterangan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi seluruh Kementerian sepakat untuk menerapkan work from home (WFH) bagi ASN dalam mengatasi polusi udara Jakarta. Aturan akan dikeluarkan oleh MenPAN RB.

"Ya, dalam rapat dengan Pak Menkomarives, salah satu rekomendasinya kita sama-sama ya, seluruh kementerian sepakat untuk work from home," kata Budi usai membuka maraton di Monas, Minggu (20/8/2023).

Keputusan itu merupakan hasil rapat bersama di kantor Kemenkomarves pada Jumat (20/8/2023). Menhub melanjutkan, Kementerian LHK juga sedang menyusun rencana modifikasi cuaca untuk mengurangi polusi udara. "Dan dilakukan pengkondisian cuaca nanti sekitar mulai tanggal 21 (Agustus)," ujar dia.

Di tempat yang sama, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan mengatakan ASN DKI Jakarta dipastikan akan melaksanakan Work From Home (WFH) 50 persen pada Senin tanggal 21 Agustus hingga 21 Oktober mendatang. Sementara khusus pada KTT ASEAN yang digelar pada 5-7 September, ASN di sekitar wilayah venue akan WFH hingga 75 persen. Sekolah di sekitar venue juga akan menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ).

"Khusus DKI, (WFH 50%) 21 Agustus. Khusus KTT ASEAN sekitar venue paling banyak di Jaksel itu 5-7 (September) WFH ditingkatkan jadi 75% khusus di lokasi itu, yang sekolah 70%," jelas Heru. "Setelah tanggal 7 (September) yang sekolah biasa

kembali dan wfh (pemprov) jadi 50% kembali," tandas dia.

Heru juga mewajibkan pejabat eselon 4 ke atas di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk menggunakan kendaraan listrik. Heru mengatakan, arahan itu disampaikan berdasarkan hasil rapat dengan Luhut. "Ya (ada arahan dari Luhut). Arahan dari beliau adalah sesegera mungkin (menerapkan sistem penggunaan kendaraan listrik)," kata Heru saat ditemui di Hutan Kota Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu (20/8/2023).

Dalam rapat itu, Luhut meminta agar Pemprov memberikan contoh kepada masyarakat melalui karyawannya. "Mulai dari karyawannya, mulai dari transportasi umumnya (dan) kendaraan berbasis listrik," lanjut Heru. Kendati ada imbauan untuk mengutamakan penggunaan transportasi umum, Heru mempersilakan pejabat yang telah terbiasa menggunakan transportasi pribadi beralih ke kendaraan berbasis listrik.

"Ya yang sudah naik kendaraan umum silakan, tapi kalau yang biasa naik motor, mobil, sesuai kemampuannya diupayakan ke arah kendaraan berbasis listrik," tutur Heru. "Kalau roda empat ada dua pilihan, hybrid atau listrik," sambung dia.

PLTU Batu Bara Diduga Pemicunya

Terpisah, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebut polusi udara Jakarta adalah yang terjelek di dunia imbas emisi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara. "Sekarang di Jakarta salah satu polusi udara terjelek di dunia karena PLTU batu bara kita," tegas Bahlil dalam Penutupan Orientasi Diponegoro Muda di Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, Minggu (20/8/2023).

Selain PLTU batu bara, Bahlil menyebut ada sumbangsih emisi kendaraan bermotor. Oleh karena itu, ia mendorong semua pihak beralih menggunakan kendaraan listrik (EV). Menurut dia, dunia saat ini sudah berubah. Bahlil menyebut Indonesia perlu bergegas mempersiapkan ekosistem energi dan industri hijau.

"Ke depan, semua orang pakai mobil listrik. Oleh karena itu, mobil baterai listrik dan Indonesia kita dorong sebagai salah satu negara produsen ekosistem baterai (dan) mobil (listrik) terbesar di dunia," tutupnya.

Senada Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin menilai, sumber dari buruknya kualitas udara di Jakarta itu dipicu pembangkit listrik

di ibu kota. Andi mengatakan, banyak faktor yang membuat kualitas udara semakin hari semakin buruk. Tapi, kehadiran 16 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang menyebabkan semakin parahnya kualitas udara, khususnya di Jakarta.

"Selain tingginya intensitas kendaraan bermotor, salah satu Penyebab utamanya betul ada 16 PLTU dan pabrik-pabrik di sekitar Jabodetabek," kata Andi.

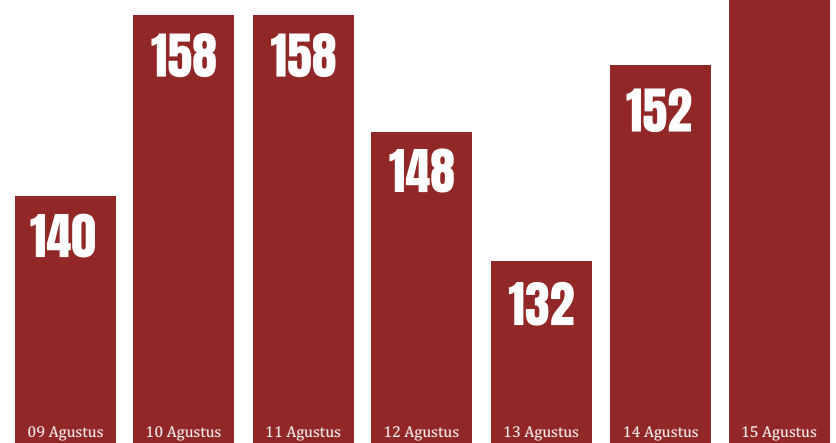
Ia merasa, untuk menemukan solusi kualitas udara Jakarta yang buruk itu diperlukan perbaikan regulasi terkait penggunaan bahan bakar kendaraan. Teknologi yang mengarah ke penggunaan energi terbarukan harus didorong. "Jika ini dibiarkan terus-menerus akan semakin memperburuk situasi lingkungan ibu kota," ujar Andi.

Andi turut mengomentari usulan kembali menerapkan work from home atau WFH. Ia merasa, usulan itu perlu dipertimbangkan karena kebijakan itu efektif mengurangi polusi walaupun cuma bersifat untuk jangka pendek. "Lalu, ganjil genap atau peralihan pabrik yang menggunakan batubara atau minyak ke sumber energi lain," kata Andi.

Meski begitu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membantah informasi yang mengatakan PLTU di Banten menjadi penyebab utama polusi udara di Jakarta dan sekitarnya. Emil, sapaan akrabnya, mengklaim grafis yang menunjukkan asap PLTU Banten mengarah ke Jakarta cuma simulasi. Ia menegaskan saat ini angin mengarah ke Selat Sunda sampai Oktober 2023 nanti. "Jadi, PLTU Banten arahnya ke Selat Sunda, bukan arah Jakarta," katanya di Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Jumat (18/8/2023). (wid,rls, ant/dya)

PANTAUAN KUALITAS UDARA JAKARTA (9-15 AGUSTUS 2023)

Data IQAir, 15 Agustus 2023



Batas Usia Maksimal Capres-Cawapres Digugat Jadi 70 Tahun Bisa Gagal Prabowo, Gerindra: Tua Belum Tentu Lemah

JAKARTA-Puluhan advokat yang mengatasnamakan diri Aliansi '98 Pengacara Pengawal Demokrasi dan HAM mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka mengajukan uji materi atau judicial review Pasal 169 huruf (d) dan (q) UU Nomor 7 Tahun 2017 terhadap UUD 1945. Sebanyak 98 pengacara itu meminta syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden diubah dari tidak terbatas menjadi maksimal 70 tahun.

Jika gugatan ini disetujui, maka Prabowo Subianto tidak bisa mencalonkan diri dalam pilpres 2024. Terkait hal ini, Waketum Gerindra Habiburokhman buka suara. Menurutnya, permohonan uji materi pembatasan usia capres cawapres ini membatasi hak orang, padahal usia bukanlah patokan.

"Sebab kondisi orang per orang bisa berbeda satu sama lain. Anak muda belum tentu belum matang, orang yang berusia senior belum tentu juga fisiknya lemah," kata Habiburokhman, Minggu (20/8/2023).

Habiburokhman pun membiarkan para penggugat untuk melanjutkan proses hukumnya mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Namun, ia mengaku heran dan merasa gugatan yang diajukan terkesan membatasi hak orang, dalam hal ini Prabowo untuk maju dalam kontestasi politik tahun depan.

"Sebagai orang yang lama sekali berkiprah di perkara perkara uji materi, saya sepertinya baru kali ini melihat ada permohonan yang intinya untuk membatasi hak orang. Padahal biasanya permohonan itu untuk meminta keadilan Konstitusional," pungkasnya.

Senada, Ketua Umum Prabowo Mania 08, Immanuel Ebenezer, atau yang akrab disapa Noel menyebut menggugat ke MK adalah hak setiap warga negara. Namun, gugatan dari Aliansi 98 pengacara ini dinilai Noel sebagai gugatan yang diskriminatif.

"Enggak masalah, kita kan tidak alergi dengan soal gugat menggugat, selama kepentingan adalah soal demokrasi, enggak masalah. Tapi kan sangat diskriminatif kalau seandainya kepemimpinan itu diukur dengan umur," kata Noel saat dihubungi, Minggu (20/8/2023).

Noel menjelaskan, alasan penggugat itu tidak rasional. Menurut Noel, usia 70 tahun itu masih dalam usia produktif seorang pemimpin. Noel mencontohkan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad yang berusia 98 tahun.

Singgung Pelanggaran HAM Berat

Sebelumnya, gugatan untuk melakukan uji materi ini dilakukan oleh Aliansi '98 pengacara pengawal demokrasi dan HAM. Mereka meminta



Sebanyak 98 pengacara telah mengajukan gugatan terkait dengan UU Pemilu soal batas maksimal Capres/Cawapres ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (18/8/2023).

agar batasan capres cawapres yang sebelumnya tidak diatur menjadi ditetapkan maksimal berusia 70 tahun.

Mereka pun membandingkan aturan ini dengan pembatasan usia para pejabat pemerintahan lainnya, seperti Hakim Mahkamah Konstitusi, Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung, dan Hakim Agung yang diatur maksimal berusia tahun.

"Jangan sampai capres dan cawapres memiliki rekam jejak pelanggaran HAM berat, terlibat dan/atau menjadi bagian peristiwa penculikan aktivis pada tahun 1998, orang yang terlibat dan/atau pelaku penghilangan orang secara paksa, orang yang terlibat dan/atau pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan dan tindakan yang anti demokrasi, serta tindak pidana berat lainnya," tulis pernyataan pers Aliansi '98 pada Minggu (20/8/2023). Gugatan diserahkan pada 18 Agustus 2023.

Adapun pasal yang diuji materi itu terkait persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Dalam huruf (d) pasal itu berbunyi 'tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya'. Sementara, huruf (q) dalam Pasal 169 berbunyi 'berusia paling rendah 40 tahun'.

Aliansi '98 menilai huruf (d) terkait tindak pidana berat lainnya, harus diperjelas oleh MK. Selain itu, menurut Aliansi '98, pasal 169 yang mengatur persyaratan menjadi capres dan cawapres belum mencakup semua hal. Aliansi '98 menilai pasal syarat

capres/cawapres seharusnya memberikan perlindungan pada rakyat Indonesia.

"Dari calon presiden dan calon wakil presiden yang memiliki rekam jejak pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat, orang yang terlibat dan/atau menjadi bagian peristiwa penculikan aktivis pada tahun 1998, orang yang terlibat dan/atau pelaku penghilangan orang secara paksa, orang yang terlibat dan/atau pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan dan tindakan yang anti demokrasi, serta tindak pidana berat lainnya," ujarnya

Aliansi '98 membandingkan dengan syarat usia capres dan cawapres dengan sejumlah jabatan lain. Antara lain, usia hakim konstitusi maksimal 70 tahun, usia Ketua Mahkamah Agung maksimal 70 tahun, usia Wakil Ketua Mahkamah Agung maksimal 70 tahun.

Kemudian, usia hakim agung maksimal 70 tahun, usia anggota Komisi Yudisial (KY) maksimal 68 tahun, usia ketua BPK maksimal 67 tahun, dan usia anggota BPK maksimal 67 tahun. Menurut Aliansi '98, presiden terpilih seharusnya merupakan sosok pemimpin yang produktif dalam menjalankan kinerjanya. Artinya, presiden terpilih seharusnya mempunyai kemampuan secara fisik, psikologis, dan moral yang stabil.

"Untuk itu, batas usia maksimal calon presiden pada Pemilu 2024 harus negara (melalui Mahkamah Konstitusi) ditetapkan dengan ketentuan paling tinggi 70 tahun pada proses pemilihan," demikian pendapat Aliansi '98. (widmrls,kum/dya)

GUGATAN KE UU NOMOR 7 TAHUN 2017 TERHADAP UUD 1945

PASAL 169

HURUF (D)

Dalam huruf (d) pasal itu berbunyi 'tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya'.

--> Aliansi '98 menilai huruf (d) terkait tindak pidana berat lainnya, harus diperjelas oleh MK. Selain itu, menurut Aliansi '98, pasal 169 yang mengatur persyaratan menjadi capres dan cawapres belum mencakup semua hal. Aliansi '98 menilai pasal syarat capres/cawapres seharusnya memberikan perlindungan pada rakyat Indonesia.

HURUF (Q)

Dalam huruf (q) dalam Pasal 169 berbunyi 'berusia paling rendah 40 tahun'.

--> Aliansi '98 membandingkan dengan syarat usia capres dan cawapres dengan sejumlah jabatan lain. Antara lain, usia hakim konstitusi maksimal 70 tahun, usia Ketua Mahkamah Agung maksimal 70 tahun, usia Wakil Ketua Mahkamah Agung maksimal 70 tahun, usia hakim agung maksimal 70 tahun, usia anggota Komisi Yudisial (KY) maksimal 68 tahun, usia ketua BPK maksimal 67 tahun, dan usia anggota BPK maksimal 67 tahun. Menurut Aliansi '98, presiden terpilih seharusnya merupakan sosok pemimpin yang produktif dalam menjalankan kinerjanya sehingga diusulkan maksimal usia 70 tahun pada proses pemilihan

Ketidaksinkronan Data dari KPU Jadi Awal yang Buruk

JAKARTA - Ketidaksinkronan data dari KPU antara total jumlah caleg yang memenuhi syarat dan total jumlah caleg hasil penjumlahan caleg laki-laki dan perempuan disinyalir sebagai awal yang buruk. Hal ini diungkapkan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi).

Dalam agenda mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI, Joko Widodo. Darmadi memandang tanggal 17 Agustus sebagai titik tolak perjuangan bangsa Indonesia. Ia menyoroti pentingnya mengenang pengorbanan dan perjuangan para pahlawan bangsa yang telah melahirkan kemerdekaan. Dengan semangat tersebutlah, Darmadi mengajak seluruh elemen untuk bersatu demi mewujudkan cita-cita pembangunan di Kabupaten Malang.

"Mari jadikan hari ini sebagai pemicu semangat karena ada tanggung jawab besar yang harus dipikul bersama. Mari kita bersemangat membangun bangsa agar sejahtera, khususnya di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang ini," ujar Darmadi, ditemui usai memimpin rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang dengan agenda Mengikuti Pidato Kenegaraan

Presiden RI dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke 78, Rabu (16/8/2023).

Darmadi menekankan, pentingnya kolaborasi dalam pembangunan. Termasuk di dalamnya kerja sama antara pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat. Pihaknya juga memandang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai panduan utama dalam meraih kemajuan di Kabupaten Malang.

"Tentunya sektor-sektor yang sesuai dengan visi misi Malang Makmur. Jadi selain urusan wajib seperti pendidikan, kesehatan, juga beberapa sektor lain. Salah satunya adalah di bidang infrastruktur. Termasuk pemberdayaan yang telah disampaikan tadi. Terkait dengan pemuda, remaja, maupun pemberdayaan terhadap ekonomi kreatif. Itu yang akan kita gerakkan di 2024," urainya.

Lebih lanjut, terkait konteks peringatan HUT RI ke-78 ini. Darmadi menggambarkan logo HUT RI sebagai simbol semangat kebersamaan dan stabilitas dalam pembangunan.

Diakhir, disinggung mengenai tema HUT RI ke-78, "Terus Melaju untuk Indonesia Maju", Darmadi

menegaskan pentingnya sinkronisasi antara Rencana APBN 2024, RPJMD, dan RAPBD Kabupaten Malang. Ia berharap agar langkah-langkah pembangunan di Kabupaten Malang dapat sesuai dengan visi nasional untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju.

"Nanti RPJMD akan menyesuaikan. Kemudian RAPBD kita 2024 juga akan menyesuaikan dengan RAPBN itu. Nah terkait dengan ke depan yakni 2024, nanti kami akan menunggu pidato lanjutan terkait laporan keuangan yang akan disampaikan oleh Presiden pada paripurna yang ke dua," tegasnya.

Sebagai informasi, dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Malang ini. Presiden RI, Jokowi, dalam pidato kenegaraannya, menekankan bahwa Indonesia mempunyai peluang besar untuk meraih Indonesia Emas Tahun 2045.



ilustrasi Pemilu

Presiden menyebutkan, peluang besar yang dimiliki yakni, adanya bonus demografi yang akan mencapai puncak di tahun 2030-an.

"68 persen adalah penduduk usia produktif. Di sinilah kunci peningkatan produktivitas nasional kita. Peluang tersebut harus mampu kita manfaatkan. Rugi besar jika kita melewatkan kesempatan ini, karena tidak semua negara memilikinya dan belum tentu akan kembali memilikinya," tegas Presiden, melalui media elektronik yang disaksikan oleh seluruh peserta rapat paripurna. (santi/dya)

Ikuti Pidato Kenegaraan Presiden RI, DPRD Kabupaten Malang Gaungkan Semangat Pembangunan dalam HUT RI ke-78



Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi, saat memimpin rapat paripurna dengan agenda Mengikuti Pidato Kenegaraan Presiden RI, dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke 78, Rabu (16/8/2023). (Iskandar/Lenteratoday)

MALANG - Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI yang ke-78 menjadi momen bersejarah bagi seluruh bangsa Indonesia, termasuk DPRD Kabupaten Malang. Dalam rapat Paripurna yang berlangsung Rabu (16/8/2023), Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi, mengarahkan perhatian pada semangat pembangunan yang harus terus ditingkatkan.

Dalam agenda mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI, Joko Widodo. Darmadi memandang tanggal 17 Agustus sebagai titik tolak perjuangan bangsa Indonesia. Ia menyoroti pentingnya mengenang pengorbanan dan perjuangan para pahlawan bangsa yang telah

melahirkan kemerdekaan. Dengan semangat tersebutlah, Darmadi mengajak seluruh elemen untuk bersatu demi mewujudkan cita-cita pembangunan di Kabupaten Malang.

"Mari jadikan hari ini sebagai pemicu semangat karena ada tanggung jawab besar yang harus dipikul bersama. Mari kita bersemangat membangun bangsa agar sejahtera, khususnya di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang ini," ujar Darmadi, ditemui usai memimpin rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang dengan agenda Mengikuti Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke 78, Rabu (16/8/2023).

Darmadi menekankan, pentingnya kolaborasi dalam pembangunan. Termasuk di dalamnya kerja sama antara pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat. Pihaknya juga memandang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai panduan utama dalam meraih kemajuan di Kabupaten Malang.

"Tentunya sektor-sektor yang sesuai dengan visi misi Malang Makmur. Jadi selain urusan wajib seperti pendidikan, kesehatan, juga beberapa sektor lain. Salah satunya adalah di bidang infrastruktur. Termasuk pemberdayaan yang telah disampaikan tadi. Terkait dengan pemuda, remaja, maupun pemberdayaan terhadap ekonomi kreatif. Itu yang akan kita gerakkan di 2024," urainya.

Lebih lanjut, terkait konteks peringatan HUT RI ke-78 ini. Darmadi menggambarkan logo HUT RI sebagai simbol semangat kebersamaan dan stabilitas dalam pembangunan.

Diakhir, disinggung mengenai tema HUT RI ke-78, "Terus Melaju untuk Indonesia Maju", Darmadi menegaskan pentingnya sinkronisasi antara Rencana APBN 2024, RPJMD, dan RAPBD Kabupaten Malang. Ia berharap agar langkah-langkah pembangunan di Kabupaten Malang dapat sesuai dengan visi nasional

untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju.

"Nanti RPJMD akan menyesuaikan. Kemudian RAPBD kita 2024 juga akan menyesuaikan dengan RAPBN itu. Nah terkait dengan ke depan yakni 2024, nanti kami akan menunggu pidato lanjutan terkait laporan keuangan yang akan disampaikan oleh Presiden pada paripurna yang ke dua," tegasnya.

Sebagai informasi, dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Malang ini. Presiden RI, Jokowi, dalam pidato kenegaraannya, menekankan bahwa Indonesia mempunyai peluang besar untuk meraih Indonesia Emas Tahun 2045.

Presiden menyebutkan, peluang besar yang dimiliki yakni, adanya bonus demografi yang akan mencapai puncak di tahun 2030-an.

"68 persen adalah penduduk usia produktif. Di sinilah kunci peningkatan produktivitas nasional kita. Peluang tersebut harus mampu kita manfaatkan. Rugi besar jika kita melewatkan kesempatan ini, karena tidak semua negara memilikinya dan belum tentu akan kembali memilikinya," tegas Presiden, melalui media elektronik yang disaksikan oleh seluruh peserta rapat paripurna. (santi/dya)

Koalisi Gemuk Persulit Penentuan Bacawapres Prabowo



(dari kiri) Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan saat deklarasi dukungan Prabowo Subianto Pilpres 2024 di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta, Minggu, 13 Agustus 2023.

JAKARTA – Bertambahnya dukungan politik di gerbong Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yaitu dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golkar tak serta-merta mempermudah pencapresan Prabowo Subianto. Bahkan, koalisi gemuk ini malah dinilai akan mempersulit penentuan Bakal Calon Wakil Presiden (Bacawapres) pendamping Prabowo.

Pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai usai deklarasi dukungan PAN menambah berkumpulnya poros Islam dari kelompok Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Ia menduga PAN akan menyodorkan Erick Thohir, yang merupakan kader NU. Sedangkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bakal menyorongkan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin untuk jadi cawapres Prabowo.

"Saya kira masuknya PAN yang akan menyodorkan Erick Thohir sebagai bakal cawapres Prabowo akan semakin memperumit, makin mempersulit siapa cawapres yang akan maju pada 2024," katanya, dikutip dari Tempo.co, Minggu (20/8/2023).

Bagi PKB, kata Adi, Cak Imin merupakan usulan yang dianggap harga mati sebagai pendamping Prabowo. "Jadi rumit," katanya.

Adi menyebutkan jika kondisi seperti ini, yang ada mobilitas KKIR bisa terhambat. Pasalnya hal ini berisiko terjadinya deadlock atau tak kunjung ada kesepakatan karena penentuan kandidat bakal cawapres tersebut. "Kalau tidak ada titik temu persoalan cawapres ini akan ada deadlock," katanya.

Ketika deadlock ini, kata Adi, berujung adanya salah satu parpol yang mengundurkan diri dari koalisi KIR. "Pasti kan ada yang keluar dari barisan politik ini," katanya.

Risiko mundurnya salah satu parpol ini, kata Adi, bisa diperkuat adanya pernyataan PKB. Partai kabah itu, kata Adi, selalu menyinggung soal ketidakjelasan Prabowo untuk menggandeng Cak Imin. "Prabowo tidak jelas terhadap Muhaimin maka PKB akan melepas Prabowo. Itu kan intimidasi politik," kata dia.

Menurut Adi, suatu keniscaayaan PKB pindah ke lain hati. "Kalau Muhaimin tidak dipilih sebagai cawapres Prabowo," katanya. Atau sebaliknya, PAN yang keluar dari KKIR jika Erick Thohir tak didapuk sebagai pendamping Prabowo dalam Pilpres 2024.

Sehingga Adi menyimpulkan pada akhirnya semua parpol saling memperebutkan proposal bakal cawapres untuk menjadi pendamping Prabowo Subianto. "Jadi sekalipun Erick Thohir selalu dikait-kaitkan dengan Prabowo, mungkin saja (bacawapres). Tapi ingat, potensial PKB akan hengkang dri KKIR. Ya rumit memang bagi Prabowo, mau pilih Erick atau atau kehilangan PKB," katanya.

Dalam meraih kemenangan, pemetaan konstituen perlu untuk menambah ceruk dukungan. Dalam pengusungan dukungan Prabowo Subianto sebagai capres, menurut Adi, PKB punya daya tawar itu.

Adi menilai Prabowo di satu sisi masih membutuhkan PKB. Keberadaan partai yang didirikan oleh Presiden Indonesia ke-4

Abdurrachman Wahid alias Gus Dur itu dinilai penting untuk menambah perolehan suara Prabowo di kantong-kantong suara Nahdlatul Ulama (NU) di Jawa Timur dan Jawa Tengah.

"Sementara PKB sangat dibutuhkan Prabowo untuk menutup kelemahan di Jawa Timur dan Jawa Tengah plus mengonsolidasi kekuatan pemilih NU," katanya.

Golkar dan PAN secara resmi mendeklarasikan dukungannya terhadap Prabowo Subianto pada Ahad pekan lalu, 13 Agustus 2023. Sebelumnya kedua partai tersebut tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu bersama Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Koalisi itu dipastikan bubar karena PPP sudah mendeklarasikan dukungannya kepada calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani menyampaikan komentarnya soal koalisi gemuk dalam menyokong calon presiden Prabowo Subianto. Muzani menuturkan masalah bangsa ini tidak mungkin diselesaikan dengan satu atau dua partai saja.

"Makin banyak partai bergabung makin baik menyelesaikan permasalahan di Indonesia, maka dari itu beliau mengajak banyak partai termasuk Partai Gelora untuk menyukseskan Indonesia 2024," ujar Muzani, Sabtu, 19 Agustus 2023 di Kantor Media Centre Partai Gelora Indonesia.

Lebih lanjut, Ahmad Muzani juga menyampaikan tanggapannya tentang banyaknya koalisi akan mempersulit menentukan calon wakil presiden dan

juga menteri-menteri jika Prabowo terpilih dalam Pilpres. "Ya kemungkinan bisa saja, tapi di atas kertas itu artinya kemenangan dipastikan. Makin banyak partai makin banyak tokoh pendukung," ungkap Muzani.

Setelah dukungan PAN dan Partai Golkar, Muzani mengatakan Partai Gelora Indonesia akan mendeklarasikan dukungan ke Prabowo di Pilpres 2024 pada akhir Agustus ini. "Tadi kami berbicara dengan Pak Mahfudz Siddiq (Sekjen Gelora), masih kami cocokkan tanggal di sini dengan waktu Pak Prabowo. Insya Allah akhir Agustus," kata Muzani.

Muzani juga menyebut masih ada parpol non-parlemen yang akan menyatakan dukungannya terhadap bakal calon presiden Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024. "Insya Allah (masih ada partai non-parlemen lain), masih dalam pembicaraan," kata Muzani.

Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Surya Paloh berkomentar atas dukungan Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang mendukung bakal calon Presiden RI 2024 Prabowo Subianto.

Dia mengatakan bahwa keberpihakan kedua partai tersebut merupakan hal yang bagus untuk menjalankan hak-hak konstitusional. "Bagus sekali bagus sekali," katanya kepada wartawan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, dikutip Minggu (20/8/2023). "Semakin bergabung semua melaksanakan kewajiban dan melaksanakan hak-hak konstitusional," tambahnya dikutip dari cnbcindonesia.

Sedangkan, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani meyakini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak ada dibalik deklarasi dukungan Partai Golkar dan PAN kepada Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden (Capres) pada Pemilu 2024. Sebab, hal itu telah ditegaskan Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan pada laporan tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023) kemarin.

"Kemarin kan saat di pidato 16 Agustus, dengar sendiri, apa yang disampaikan presiden bahwa presiden adalah Presiden RI, Pak Jokowi adalah Presiden RI, bukan ketua umum, bukan ketua koalisi," kata Puan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (17/8/2023).

Ketua DPR RI ini memastikan, Jokowi tak ada urusan dalam menentukan poros koalisi pada Pilpres 2024. Menurutnya, Jokowi sebagai kepala negara fokus pada urusan pemerintahan.

"Jadi saya meyakini hal tersebut, bahwasanya urusan politik jangan dicampur aduk dengan urusan pemerintahan," tegas Puan. (lut/dya)



JOSHUA SEVENTEEN



JANE MOMOLAND BANTAH RUMOR KENCAN DENGAN JOSHUA SEVENTEEN

JANE, personel grup idola K-pop MOMOLAND membantah dirinya terlibat asmara dengan salah satu personel grup idola SEVENTEEN, Joshua.

Dia melalui unggahan di platform komunikasi penggemar seperti disiarkan Soompi, Sabtu, menyatakan tidak memiliki hubungan apa pun dengan Joshua, namun orang-orang tetap berpendapat sebaliknya.

Jane mengatakan sudah lama menyadari ada desas-desus dan penggemar benar-benar menelepon ke agensinya untuk bertanya tentang hal itu.

"Jadi aku bahkan menghadapi kesalahpahaman di agensi karena ini," kata dia.

Bantahan Jane tentang hubungan asmaranya dengan Joshua ini muncul setelah sebuah unggahan di komunitas daring pada awal bulan Agustus mengklaim bahwa Joshua pernah menjalin hubungan dengan anggota grup idola selama beberapa tahun lalu.

Meskipun

penulis unggahan itu tidak secara langsung menyebutkan nama personel grup yang dimaksud, namun dia memberikan petunjuk tentang identitasnya. Banyak orang berspekulasi unggahan tersebut tentang Jane MOMOLAND.

Profil grup Momoland

Momoland adalah grup girlband Korea Selatan yang populer saat ini. Grup ini berada pada label MLD Entertainment dan pertama debut tahun 2016. Terdapat 9 personel Momoland yakni Hyebin, Yeonwoo, Jane, Taeha, Nayun, Daisy, JooE,

Ahin dan Nancy.

Banyak lagu Korea enak didengar yang dinyanyikan Momoland sebagai salah satu grup K-Pop terkenal saat ini.

Momoland sukses menjadi salah satu girlband Korea papan atas yang cukup populer. Mereka konsisten menghasilkan lagu hits. Contoh lagu-lagu Momoland terbaik yang menjadi hits adalah Freeze, Wonderful Love, Bboom Bboom, Jjan! Koong! Kwong! dan lain-lain.

Banyak penghargaan musik yang diraih Momoland. Mereka juga memiliki banyak fanbase di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Kini nama Momoland pun disejajarkan sebagai salah satu grup Korea paling populer baik di Korea Selatan.

Debut sejak tahun 2016, Momoland awalnya

beranggotakan 7 orang. Member Momoland dipilih dari program reality show Finding Momoland. Di tahun 2017, terdapat 2 tambahan personel sehingga total terdapat 9 member Momoland yang aktif sekarang ini.

Grup Momoland pertama kali debut pada tahun 2016. Awalnya terdapat 7 anggota Momoland saat pertama kali debut, namun pada tahun 2017 bertambah 2 anggota lagi.

Nama-nama personel Momoland antara lain adalah Hyebin, Yeonwoo, Jane, Nayun, JooE, Ahin, Nancy serta kemudian ditambah Daisy dan Taeha yang bergabung tahun 2017.

Perekrutan member Momoland dilakukan lewat program reality show Finding Momoland. Sejak tahun 2017, nama Momoland dianggap sebagai salah satu grup girlband Korea terpopuler dan terhitis.

Momoland juga banyak mendapat penghargaan di tingkat Korea dan Asia. Fans Momoland pun tersebar di seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia (berbagai sumber)



MOMOLAND

BERAT BADAN MENDADAK NAIK?

HATI-HATI KENA PENYAKIT INI

NAIK dan turunnya berat badan bisa disebabkan oleh berbagai faktor gaya hidup seperti usia, penyakit, pola makan, hormon, dan tingkat aktivitas fisik.

Biasanya, berat badan bisa naik atau turun beberapa gram atau kilo dalam beberapa hari. Namun, jika Anda mengalami kenaikan berat badan yang tiba-tiba atau tidak terduga dalam waktu singkat, hal ini bisa menjadi pertanda dari suatu penyakit.

Berikut ini adalah beberapa kemungkinan kondisi kesehatan yang dapat menyebabkan kenaikan berat badan yang tidak terduga.

1. Hipotiroidisme

Hipotiroidisme atau hipotiroid adalah gangguan kesehatan yang terjadi karena kurangnya produksi hormon tiroid oleh kelenjar tiroid. Kondisi ini dapat menyebabkan penderitaanya mudah lelah dan susah untuk berkonsentrasi.

Hipotiroid dapat dialami oleh siapa saja, namun paling sering terjadi pada wanita lanjut usia. Kondisi ini biasanya tidak menimbulkan gejala secara spesifik di awal, namun gejalanya akan semakin berat seiring berkembangnya penyakit.

Hipotiroid juga dapat menyebabkan retensi air karena penurunan efisiensi hormon tiroid dalam mengatur keseimbangan cairan dalam tubuh. Hal ini dapat menyebabkan kenaikan berat badan sementara.

2. Gagal jantung, penyakit ginjal atau hati

Menurut para ahli kesehatan, gagal jantung, penyakit ginjal atau hati juga dapat menyebabkan retensi cairan dalam tubuh.

Hal ini dapat menyebabkan kenaikan berat badan secara tiba-tiba.

3. Sindrom cushing

Sindrom cushing adalah kondisi dimana tubuh memproduksi kortisol (hormon yang mengatur metabolisme) dalam jumlah yang berlebihan.

Dalam kondisi ini, penambahan berat badan terutama terjadi pada bagian tubuh seperti wajah, punggung atas dan perut.

4. Sindrom ovarium polikistik (PCOS)

Sindrom ovarium polikistik (PCOS) juga dapat menyebabkan kenaikan berat badan pada orang dengan ovarium. Hal ini terjadi karena

resistensi insulin dan ketidakseimbangan hormon.

Mengutip halodoc, bertambahnya berat badan umumnya dilihat dan diukur melalui tampilan luar saja. Biasanya, seseorang menyadari berat badan bertambah saat merasa baju tertentu kekecilan atau tumpukan lemak di bagian tubuh tertentu semakin terasa.

Nyatanya, kenaikan berat badan memang bisa menyebabkan terjadinya perubahan pada penampilan seseorang.

Tapi tahukah kamu, ternyata tidak hanya tampilan luar saja yang mengalami perubahan. Kenaikan berat badan juga memengaruhi kondisi tubuh secara keseluruhan, lho.

Faktanya, kemampuan indera perasa untuk mengecap rasa masakan bisa menurun seiring dengan naiknya berat badan.

Sebuah penelitian menyebut bahwa kelebihan berat badan alias obesitas bisa menyebabkan menurunnya reseptor rasa hingga 25 persen.

Alhasil, kondisi ini menyebabkan seseorang cenderung mengonsumsi lebih banyak makanan, karena ingin bisa kembali merasakan "kenikmatan" dari makanan yang dikonsumsi. (berbagai sumber)

- •
- •
- •
- •



SPEK MOTOR LISTRIK HONDA EM1 e: VERSI INDONESIA

PT Astra Honda Motor (AHM) telah merilis Honda EM1 e. Motor listrik ini dibanderol dengan harga kisaran Rp 40 juta sampai Rp 45 juta.

Kabarnya, EM1 e: mendapat penyesuaian spesifikasi dengan model yang sudah meluncur lebih dulu di Eropa.

Octavianus Dwi Putro, Direktur Pemasaran PT AHM, mengatakan, spek Honda EM1 e: versi Indonesia berbeda dengan model Eropa.

"Spek ada beberapa perubahan dan pengembangan speknya. Terutama kayak beberapa safety dan kenyamanan terkait dengan banjir," ujar Octa di Tangerang, akhir pekan lalu.

Adapun baterai diklaim sama dengan model Eropa. Seperti diketahui, baterai Honda EM1 e: memiliki profil 50,26V 26,1Ah atau sekitar 1,3 kWh dengan bobot 10,3 kg, dengan jarak tempuh mencapai 41,1 km (WMTC Mode).

"Kita kan supaya tahan dengan kondisi, beberapa daerah di Indonesia kan ada genangan banjir. Nah itu kita menyesuaikan. Mulai dari desainnya, kita ubah. Supaya lebih safety buat konsumen," ucap Octa.

Sebagai informasi, EM1 e: mengusung in-wheel 3 phase brushless motor alias motor hub dengan tenaga 1,7 kW atau setara 2,3 Tk dan torsi sekitar 90 Nm, yang bisa mengantar hingga kecepatan maksimal 45 kph.

Beralih ke bagian kaki-kaki, Honda EM1 e: dibekali suspensi

teleskopik di depan dan Twin Rear Suspension di belakang.

Lalu, lingkaran roda pakai ukuran 90/90-12 di depan dan 100/90-10 di belakang. Melihat spesifikasinya, EM1 e: memiliki desain mungil dengan ukuran (PxLxT) 1.795 mm x 680 mm x 1.080 mm, serta jarak sumbu roda 1.300 mm dan ground clearance 135 mm.

Dalam hal penerangan, semua titik pencahayaan pada Honda EM1 e: telah dilengkapi dengan teknologi lampu LED.

Honda EM1 e: juga dilengkapi dengan inner rack atau rak bagian dalam serta USB charger type A untuk semakin memudahkan mobilitas konsumen.

Terkait tinggi, Honda EM1 e: memiliki tinggi 135 mm dari permukaan tanah.

Honda EM1 e yang dilengkapi baterai Mobile Power Pack (MPP) e: bakal dipasarkan dengan harga sekitar

Rp 40 juta–Rp 45 juta (Honda EM1 e: Rp 30 juta–Rp 33 juta+baterai MPP e: Rp 10 juta–Rp 12 juta).

Nantinya, motor listrik berdesain modern-compact ini akan dijual pada jaringan diler sepeda motor Honda yang memiliki logo Honda e: shop.

Saat ini, Honda EM1 e: punya tiga pilihan warna, yaitu Innovative White, Smart Red, dan Intelligent Matte Black.

Melihat spesifikasinya, EM1 e: memiliki desain mungil dengan ukuran (PxLxT) 1.795 mm x 680 mm x 1.080 mm, serta jarak sumbu roda 1.300 mm.

Bobotnya EM1 e: juga terbilang ringan hanya 93 kg, dengan tinggi jok 740 mm, serta ground clearance 135 mm.

Dapur pacu motor ini mengusung hub motor bertenaga 1,7 kW pada 540 rpm. AHM mengklaim kecepatan maksimal bisa mencapai 45 kph.

Adapun baterai Honda EM1 e: memiliki profil 50,26V/26,1Ah atau sekitar 1,3 kWh dengan bobot 10,3 kg, dengan jarak tempuh mencapai 41,1 km (WMTC Mode).

Waktu pengecasan dari 0 sampai 100 persen memakan waktu hingga 6 jam. Sedangkan dari 25 persen sampai 75 persen cuma 2,7 jam.

President Director AHM Susumu Mitsuishi menyampaikan, kehadiran Honda EM1 e: di Indonesia merupakan salah satu bentuk komitmen Honda dalam mewujudkan netralitas karbon.

Mitsuishi juga berharap kehadiran Honda EM1 e: dapat memberikan masyarakat Indonesia akses terhadap sepeda motor listrik dengan teknologi dan kualitas terbaik. (berbagai sumber)



HARIAN
LENERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENERA TODAY"

PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI

OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)

PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)

PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)

REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)

MEDIA TERVERIFIKASI



BIRO: SURABAYA: LUTFI YUHANDI | **MOJOKERTO:** RAHMAD SURYADI | **GRESIK-LAMONGAN:** ASEPTA YOGA P (ID SERTIFIKASI 3189) | **KEDIRI-JOMBANG-NGANJUK:** GATOT SUNARKO | **TAPAL KUDA (PASURUAN-PROBOLINGGO BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI):** IMAN SANTOSO, | **MADIUN:** IMAM GHOZALI (ID SERTIFIKASI 11563), | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **TRENGGALEK:** ANGGA PRAYOGA

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO | **SEKERTARIS** ISTIDHA NUR AMANAH,

DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenalan wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenalan wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenalan atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.



TANDA-TANDA SAATNYA MENGANTI PERAWATAN KULIT

SEBAGIAN besar orang, semua gender dan umur, memiliki rutinitas perawatan kulit. Melakukan hal terkecil untuk merawat dan melindungi kecil juga termasuk dalam rutinitas.

Tiap orang memiliki rutinitas perawatan kulit berbeda tergantung kebutuhannya masing-masing.

Umumnya, perawatan kulit yang dilakukan adalah sesederhana mencuci muka dan menggunakan tabir surya.

Banyak orang juga memiliki rutinitas yang prosesnya lebih lama, seperti menggunakan krim pagi, serum, dan masker wajah.

Dilansir dari Insider, Senin (14/8/2023), Anda bisa memilih rutinitas perawatan kulit bisa membuat nyaman dan bermanfaat dalam banyak hal, tetapi tidak selalu bertahan selamanya. Akan ada perubahan dalam kulit yang membuat rutinitas perawatan berubah.

Dalam hal menyusun rutinitas perawatan kulit khas yang baik, diperlukan uji coba dan kesalahan untuk menemukan daftar favorit yang tepat.

Setelah semua eksperimen itu, tidak mudah untuk meninggalkan beberapa produk atau langkah perawatan kulit yang telah dicoba dan benar dalam rutinitas, tetapi terkadang, itu diperlukan.

Dilansir dari Real Simple, menurut Macrene Alexiades, dokter kulit, mengganti semua produk Anda sekaligus bukanlah ide yang cerdas.

Dia merekomendasikan mengubah satu produk pada satu waktu dan tidak mengubah seluruh rutinitas Anda sekaligus. Jika ingin mengubah seluruh rutinitas Anda, cobalah satu produk baru setiap minggu.

Simak tanda-tanda Anda perlu mengganti rutinitas perawatan kulit:

1. Telah menggunakan produk yang sama selamanya

Jika masih menggunakan toner yang sama dari SMA, Anda mungkin sudah waktunya untuk beralih. Kulit akan berubah seiring waktu dan membutuhkan produk yang berbeda tergantung tujuan.

Kemungkinan besar Anda akan melihat perbedaan yang signifikan jika memilih produk untuk kulit dan usia Anda saat ini.

2. Tidak lagi melihat hasil

Jika telah menggunakan krim anti jerawat dan tiba-tiba muncul jerawat, ada kemungkinan Anda perlu mencoba beberapa produk baru.

Anda juga bisa mencari bantuan profesional. Banyak spa dan klinik perawatan kulit menawarkan konsultasi gratis dan dapat membantu Anda memilih yang terbaik.

3. Musim berubah

Tergantung di mana Anda tinggal, Anda mungkin ingin mengevaluasi kembali rutinitas perawatan kulit beberapa kali dalam setahun, terutama jika kulit Anda bereaksi terhadap cuaca.

Musim panas atau kemarau mungkin membutuhkan pelembap yang lebih ringan dan tabir surya yang lebih banyak SPF. Sementara itu, musim hujan atau dingin mungkin membutuhkan lebih banyak kelembapan dan bahan perawatan untuk udara dingin yang kering.

Apa pun musimnya, Anda tetap perlu memakai tabir surya sepanjang tahun. Baca Juga Manfaat Eksfoliasi Kulit Wajah

4. Jenis kulit berubah

Jika kulit tiba-tiba kering, teriritasi, atau pecah-pecah, ada baiknya mencoba produk dengan bahan berbeda. Kulit bisa berubah seiring jalannya waktu. Anda perlu memperhatikan tanda-tanda tersebut dan hentikan penggunaan produk.



Sumber :
Shutterstock

5. Ingin mengubah sesuatu dari kulit

Meskipun tidak ada produk kulit yang menjamin kesempurnaan mutlak, mereka dapat membantu Anda mencapai beberapa tujuan atau penampilan perawatan kulit yang diinginkan.

Ada begitu banyak cara dan

produk berbeda untuk mengubah segalanya dan meningkatkan rutinitas Anda yang biasa agar sesuai dengan suasana hati, musim, atau estetika yang Anda inginkan (bisnis)



Pengusaha Ancam (dari hal 1)

KETUA Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey menyebut utang rafaksi alias pembayaran selisih harga migor dalam program satu harga pada 2022 itu tak jelas hingga sekarang. Roy menyebut, meski sudah setahun setengah pihaknya menagih, pemerintah masih belum mau membayar utang Rp344 miliar itu.

"Ini hasil dari meeting dengan 31 peritel. Jadi poin-poin ini bukan dari Aprindo," kata Roy, dari keterangannya Minggu (20/8/2023).

Kendati masih dihadapkan pada ketidakpastian, Aprindo masih terus berupaya untuk menyelesaikan polemik pembayaran utang rafaksi minyak goreng tersebut dengan lima langkah. Langkah pertama, Roy menegaskan pihaknya akan terus menindaklanjuti polemik tersebut ke Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan agar bisa berkomunikasi ke Kementerian Perdagangan.

"Jadi, posisi akhir Aprindo, kita akan memfollow up terus kepada Kemenkopohukam yang saat ini berada dalam komunikasi dan koordinasi kepada Kemendag," ujarnya.

Selanjutnya, langkah kedua, Aprindo berencana akan melakukan pemotongan tagihan kepada distributor atau supplier minyak goreng. Hal itu dilakukan karena bisnis ritel saat ini sedang menurun, ditambah polemik rafaksi belum terselesaikan.

"jadi, poin 2, dari perusahaan peritel ya kepada distributor migor. Akan ada pemotongan tagihan. Karena apa? karena ritel lagi rendah, bila penyelesaian rafaksi belum selesai," katanya.

Langkah ketiga, Aprindo akan melakukan pengurangan pembelian minyak goreng jika penyelesaian rafaksi belum selesai dari perusahaan peritel kepada distributor minyak goreng.

Kemudian, langkah keempat, Aprindo akan menghentikan pembelian minyak goreng oleh perusahaan peritel kepada distributor minyak goreng, jika tidak ada ketidakpastian terkait rafaksi.

Terakhir, pihaknya akan menggugat hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) melalui kuasa perusahaan peritel kepada Aprindo. "Terakhir gugatan hukum. Perusahaan ritel memberikan kuasa kepada Aprindo untuk bersama kuasa hukum membawa permasalahan rafaksi minyak goreng melalui gugatan kepada PTUN sebagai langkah akhir," kata Roy.

Lebih lanjut, Roy mengaku pihak Aprindo tidak bisa berbuat banyak apabila para peritel sudah memutuskan mengambil tindakan tersebut. Menurutnya, yang bisa dilakukan Aprindo saat ini adalah tetap melakukan follow up melalui Kemenkopohukam kepada Kemendag.

"Atas langkah langkah tersebut maupun langkah apapun lainnya dari perusahaan ritel, bagaimana dan kapan akan dilakukan, kami Aprindo tidak tahu dan tidak memiliki

wewenang mencampuri atau pun mengintervensi," jelas Roy.

Roy juga mengatakan bahwa pihaknya tidak akan berhenti dan menyerah serta takut atau mudur dalam memperjuangkan hak rafaksinya

Kemendag Jamin Stok Aman

Di lain sisi, Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga yakin langkah peritel tersebut tak akan membuat minyak goreng langka di pasaran.

Jerry menyebut minyak goreng, seperti Minyakita, curah, hingga yang premium, tidak hanya dijual di gerai ritel. Ada juga yang dijual di pasar serta melalui perdagangan daring sehingga masyarakat punya banyak akses untuk memperoleh minyak goreng.

"Dibilang minyak goreng nanti tiba-tiba jadi langka ya tidak begitu. Intinya medium kita untuk memperoleh minyak goreng itu kan tersebar di mana-mana sehingga sekali lagi ini bukan kekhawatiran," kata Jerry.

Akan tetapi, Jerry menghargai Aprindo sebagai salah satu pemangku kepentingan alias stakeholder. Ia pun mengajak Aprindo duduk bersama untuk menyamakan persepsi soal sengkaret utang rafaksi minyak goreng.

Ia menekankan Kemendag masih mempelajari masalah rafaksi minyak goreng untuk menentukan sikap kementerian ke depannya.

Di lain sisi, Jerry menyebut Kejagung sudah mengeluarkan pendapat hukum bahwa penyelesaian rafaksi minyak goreng diselesaikan menurut peraturan yang berlaku. "Kita lihat yang ke depannya, yang terbaru, dan ter-update. Jadi kita mengacu kepada peraturan yang terkini," tutupnya.

Tahun lalu, pemerintah mengintervensi pasar dengan mewajibkan seluruh ritel modern anggota Aprindo untuk menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter.

Hal itu tertuang dalam Permendag Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDPKS.

Kebingungan terjadi ketika Permendag Nomor 3 Tahun 2022 yang seharusnya berlaku sampai enam bulan malah diganti Permendag Nomor 6 Tahun 2022, hanya sebulan setelah dirilis. Hal ini menyebabkan Permendag Nomor 3 Tahun 2022 yang mengatur soal utang rafaksi itu tak berlaku lagi.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim mengatakan pemerintah tengah mendalami kasus ini. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pun telah selesai mengaudit soal utang Rp 344 miliar. Sayangnya, Isy enggan membeberkan hasil audit tersebut.

Ia mengatakan ada perbedaan jumlah besaran utang yang disebutkan oleh pihak pengusaha dan hasil verifikasi surveyor independen, Sucofindo. Alhasil, pemerintah

meminta BPKP untuk mengaudit utang subsidi minyak goreng ini, sehingga Kemendag akan memberikan keputusan sesuai dengan hasil legal opinion (LO) dari BPKP.

Pada Juli lalu, Isy mengaku telah menemui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Kemenkopohukam Mahfud MD untuk membahas soal utang rafaksi minyak goreng ini. Rencananya, pemerintah akan mengadakan rapat kembali sebelum menemui Aprindo.

Sebelumnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meminta pemerintah segera membayar utang selisih harga minyak goreng (rafaksi) kepada pengusaha ritel. Mengingat masalah utang minyak goreng ini berpotensi merugikan masyarakat kedepannya.

Direktur Ekonomi KPPU Mulyawan Ranamanggala mengatakan untuk proses pembayaran itu diperlukan adanya aturan penguat dari Kementerian Perdagangan (Kemendag). Pasalnya, Permendag Nomor 3 Tahun 2021 mengenai selisih harga minyak goreng sudah tidak berlaku lagi.

Diketahui, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengancam akan melakukan boikot atas penjualan minyak goreng di pasaran jika rafaksi tak kunjung dibayarkan. Mulyawan menilai hal ini bisa berdampak pada kerugian masyarakat lebih jauh kedepannya.

"Untuk itu, KPPU menyarankan Pemerintah c.q. Kementerian Perdagangan mengeluarkan regulasi yang isinya adalah melaksanakan kewajiban untuk membayar pelaku usaha yang telah selesai diverifikasi sesuai dengan Permendag No. 3 Tahun 2022. Persoalan ini patut menjadi prioritas Pemerintah guna menghindari kerugian atau dampak yang lebih luas kepada masyarakat," ujar dia, dalam keterangan resmi, Kamis (11/5/2023).

"Terlebih minyak goreng merupakan salah satu komoditas yang sangat dibutuhkan masyarakat, sehingga adanya gangguan dalam pasokan akan mengakibatkan kenaikan harga

minyak goreng dan pada akhirnya akan sangat berpengaruh terhadap tingkat inflasi," sambung Mulyawan.

Mulyawan mengatakan adanya gangguan kebijakan berkaitan dengan rafaksi dapat menimbulkan iklim usaha yang tidak kondusif, karena tidak memberikan kesempatan berusaha yang sama bagi para pelaku usaha. Hal ini bertentangan dengan salah satu tujuan pembentukan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

"KPPU melihat kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan rafaksi (selisih antara Harga Acuan Keekonomian/HAK dengan Harga Eceran Tertinggi/HET), yakni Permendag No. 3 Tahun 2022, berdasarkan penilaian menggunakan Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha (DPKPU) belum mempertimbangkan aspek efisiensi dalam pelaksanaannya," tuturnya.

KPPU mencatat, berdasarkan informasi dari Pemerintah, HAK minyak goreng kemasan bulan Januari 2022 adalah sebesar Rp17.260, yang berada di bawah harga rata-rata Januari 2022 sebesar Rp20.914. Sementara berdasarkan Permendag No. 3 Tahun 2022, HET minyak goreng kemasan adalah sebesar Rp14.000.

Peraturan tersebut mengatur Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) melakukan pembayaran subsidi dari selisih HAK dan HET yang ditetapkan sebagai akibat pelaksanaan kebijakan satu harga minyak goreng kemasan yakni Rp14.000. "Dengan tidak dilaksanakannya kebijakan Permendag No. 3 Tahun 2022, diperkirakan terdapat tagihan rafaksi sebesar Rp1,1 triliun yang tidak dibayarkan," terangnya.

Tagihan tersebut berasal dari produsen minyak goreng dan distributor yang mencapai lebih kurang Rp700 miliar dan sebesar Rp344.355.425.760 kepada sekitar 600 korporasi ritel modern di seluruh Indonesia. Dalam hal ini pelaku usaha mengalami dua kali kerugian, yakni selisih HAK dengan harga pasar dan selisih harga HAK dengan HET. (wid,rls,ant,kum/dya)

HARGA RATA RATA PANGAN SERTA PERUBAHANNYA (18/08/2023)

DAGING AYAM RAS SEGAR

Rp 36.150 per kg

↑ 0,42% - Rp 150

CABAI RAVIT MERAH

Rp 53.600 per kg

↑ 0,75% - Rp 400

CABAI MERAH KERITING

Rp 44.900 per kg

↑ 4,66% - Rp 2000

MINYAK GORENG CURAH

Rp 15.400 per kg

↓ -0,32% - Rp -550

MINYAK GORENG KEMASAN BERMEREK 1

Rp 21.300 per kg

II HARGA TETAP

MINYAK GORENG KEMASAN BERMEREK 2

Rp 19.800 per kg

II HARGA TETAP



KOLABORASI ENTASKAN KEMISKINAN DI SURABAYA

LAILA MUFIDAH: PERUSAHAAN WAJIB SERAP TENAGA KERJA LOKAL

SURABAYA - Pengentasan kemiskinan dan perangi pengangguran merupakan tanggung jawab semua pihak. Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah pun menyerukan agar perusahaan di seluruh Kota Pahlawan ini wajib menyerap tenaga kerja lokal.

Warga ber-KTP Surabaya harus dipekerjakan di perusahaan, industri, supermarket, mal, hotel dan jenis berbagai sektor usaha lain. Bila terwujud kolaborasi tersebut, pengembang Kota Pahlawan akan berjalan optimal.

"Saya melihat upaya serius Pemkot Surabaya mengentaskan kemiskinan dan perangi pengangguran dengan proyek padat karya. Jangan lupa, banyak perusahaan di Surabaya. Harus memberi nilai tambah pada kesejahteraan warga Surabaya," kata Laila dikonfirmasi Minggu (20/8/2023).

Pihak swasta yang sudah mendapat kemudahan usaha di Surabaya, memiliki tanggung jawab sosial untuk merekrut tenaga kerja asli Surabaya. Apalagi, Surabaya selain kota industri juga merupakan kota jasa dan perdagangan besar. "Perusahaan banyak di Surabaya. Namun belum semua membawa berkah bagi warga Surabaya," katanya.

Pimpinan DPRD Surabaya ini terus mendesak semua perusahaan dan pengusaha Surabaya memberi kuota khusus bagi tenaga kerja ber-KTP Surabaya. Desakan itu harus terus dilakukan karena keberadaan perusahaan harus sama-sama memberi nilai tambah.

Dikatakannya, bukan berarti membebani pihak perusahaan. Tapi



Saya melihat upaya serius Pemkot Surabaya mengentaskan kemiskinan dan perangi pengangguran dengan proyek padat karya. Jangan lupa, banyak perusahaan di Surabaya. Harus memberi nilai tambah pada kesejahteraan warga Surabaya,"



LAILA MUFIDAH
Wakil Ketua DPRD Surabaya



Job fair atau bursa kerja di Surabaya selalu diserbu masyarakat. (dok.humas)

lebih mengajak pelaku usaha itu sama-sama memberi kemaslahatan bagi warga Surabaya. "Mereka sudah mengoperasikan mesin usahanya di kota ini. Salah satu imbal balik dan hubungan saling menguntungkan adalah mempekerjakan tenaga kerja warga lokal Surabaya," tegasnya.

Menurutnya, desakan ini harus disampaikan agar beban APBD dengan program padat karya tidak makin berat. "Harus sama-sama bergerak agar warga Surabaya mendapat jaminan pekerjaan. Pemkot dan perusahaan bisa berkolaborasi mengentaskan pengangguran," kata Laila.

Politisi perempuan PKB ini mendukung jika ada aturan yang mengikat agar perusahaan dan pelaku usaha di Surabaya patuh mempekerjakan warga asli Surabaya. Semangatnya adalah bersinergi bersama demi memberi kesempatan pekerjaan bagi warga Surabaya.

Laila mencermati upaya Pemkot Surabaya sudah taktis dengan membuat proyek padat karya. Memanfaatkan lahan dan aset untuk usaha bersama. Mulai dari mendirikan cafe berkelas dengan semua pekerja adalah warga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kemudian membuat usaha cuci motor dan mobil.

Tidak berhenti di situ, mendirikan jasa potong rambut. Bahkan ada usaha di bidang budidaya makanan. Yang paling nyata terlihat adalah mendirikan pabrik paving. Produk paving akan dibeli Pemkot langsung untuk pembangunan di setiap wilayah. "Kami mengimpikan ada sinergitas antara perusahaan dan Pemkot dalam upaya penyerapan tenaga kerja. Kalau semua padat karya dengan sumber uang Pemkot, APBD akan makin terbebani," kata Laila.

Aturan 40% Warga Lokal

Salah satu yang bisa memberi kekuatan untuk mendesak perusahaan peduli dengan tenaga kerja lokal adalah dengan Perda Ketenagakerjaan. Saat ini, DPRD Surabaya sudah membuat Perda inisiatif untuk mengikat setiap perusahaan dan pelaku usaha lainnya wajib mempekerjakan tenaga kerja lokal Surabaya.

Aturan dan tata kelola tenaga kerja lokal untuk perusahaan di Surabaya itu sudah disampaikan ke Pemkot Surabaya. Tidak ada alasan bagi Pemkot untuk mengabaikan Raperda Ketenagakerjaan ini. Salah satu poin penting adalah mewajibkan perusahaan mempekerjakan warga asli Surabaya.

Dalam Raperda inisiatif DPRD Surabaya yang memuat kajian tersebut sudah disebutkan bahwa setiap perusahaan setidaknya memberi kuota 40 persen tenaga kerja dari warga Surabaya. Artinya total kebutuhan tenaga kerja di perusahaan itu wajib merekrut hampir separo kebutuhan tenaga kerja.

"Saat ada usaha baru atau pembukaan cabang baru, wajib hukumnya memprioritaskan tenaga kerja lokal. Memang saat ini perusahaan sudah berjalan. Tapi saat ada kebutuhan tenaga kerja harus merekrut warga asli Surabaya," kata Laila.

Dengan aturan yang mengikat itu, perusahaan bisa menyerap tenaga kerja minimal 40 persen warga ber-KTP Surabaya. Dengan begitu, angka pengangguran akan menurun. Saat ini, Pemkot Surabaya bersama DPRD tengah berjuang mengentaskan pengangguran.

Masukan diperlukan dalam rangka penyusunan regulasi, kebijakan, pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). Namun semangat untuk mengatasi pengangguran ini harus mendapatkan hasil. Pekerja lokal atau warga asli Surabaya harus dilindungi.

Selama ini tidak ada kewajiban apa pun bagi pelaku usaha di Surabaya merekrut tenaga kerja lokal atau warga ber-KTP Surabaya. Perusahaan menggunakan sistem rekrutmen sendiri untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja mereka.

Apalagi saat ada perusahaan baru yang beroperasi di Surabaya. Tidak hanya perusahaan atau industri, hotel, mal, dan usaha properti (pengembang) juga banyak membutuhkan tenaga kerja. Ada asumsi yang menyebut bahwa warga Surabaya pilih-pilih pekerjaan.

Selain itu ada anggapan yang belum tentu kebenarannya bahwa tenaga kerja Surabaya tidak segiat dari daerah lain. "Saya yakin tenaga kerja Surabaya bisa diandalkan. Makanya Dinas Tenaga Kerja perlu melakukan peningkatan pelatihan sesuai keterampilan yang dibutuhkan perusahaan," kata Laila.(ADV)

